

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
DI KELURAHAN BLAMBANGAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN.**

Rola Pola Anto, Yessie Anggiarista

ABSTRACT

The problem in this research is that, (1) How is the implementation policy of rice for prosperous in the village Blambangan District Blambangan Umpu Way Kanan? (2) What aspects inhibit the implementation of the rice-feeding policy in the village Blambangan District Umpu Way Kanan?

This study uses a qualitative research type with a descriptive analysis method. The use of this method is to describe the policy of giving Rice Sejahtera (Rastra), in the village Blambangan District Blambangan Umpu Way Kanan, reviewing qualitative, how all data is obtained directly from the informant With interviews and observation.

Based on the results of the research, that the rice feeding policy, through the dimension (1) The ideal policy, that the Government's policy to provide a very helpful community in fulfilling basic life needs, (2) The objectives Policy, has been in accordance with government policy to help the poor family, but can not be implemented optimally because there are still poor families who can not pay the rice for its area, (3). Implementing organization has been made according to the needs, but in the implementation is not in accordance with the functions and authority of each field, even impressed the organization is less running, its implementation because the employees are appointed relative Little, so Lurah still dominates the Rice division system, (4) environmental factors, has been in accordance with the presence of rice for prosperous in the village, but can not reduce the poverty rate. The inhibiting aspects are: (1) not effective in the implementation of the policy, (2) the relative lack of resource capabilities in the implementation of the Policy rice for prosperous in the village, (3) Inadequate work facilities, the warehouse of rice shelters, and even partly The existing rice was placed at the house of Lurah, so it could interfere in its management.

Keywords: implementation, policy, rice.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan belum mampu mencapai tujuan optimal sebagaimana yang diharapkan (P2KP,1999). Hal ini adalah akibat suatu kebijakan dilaksanakan sebagai hasil perencanaan dari atas (*top down*), yang menganggap bahwa pihak-pihak perencana tersebut lebih tahu sehingga masyarakat sebagai sasaran program kurang atau bahkan sama sekali tidak diikutsertakan dalam merumuskannya. Dampaknya masyarakat sebagai sasaran tidak punya rasa memiliki. Di samping itu, kebijakan yang diturunkan kurang dibarengi dengan upaya-upaya tindak lanjut. Akibatnya tujuan yang telah dirumuskan oleh suatu kebijakan tidak tercapai secara optimal.

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut dapat dijelaskan bahwa, masalah kemiskinan merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani, kebijakan rastra merupakan salah satu solusi yang diimplementasikan pemerintah, melalui instansi terkait untuk menanggulangi sesuatu masalah yang sedang dihadapi.

Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kelurahan yang mendapat bantuan beras sejahtera untuk tangga miskin dengan jumlah penduduk yaitu 16.246 kepala keluarga (KK), sedangkan jumlah keluarga miskin sebanyak 8.126 Kepala Keluarga (KK), dari jumlah tersebut pada tahun 2016 terdapat 397 Kepala Keluarga (KK) miskin, yang ada di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan yaitu 286 KK miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu

Tahun	Jumlah KK	Dapat Rastra (KK)	Tdk dapat Rastra (KK)	%
2016	397	358	39	9.82
2017	339	315	24	7.08
2018	286	278	8	2.79

Sumber : Kelurahan Blambangan 2019.

Dari tabel 1. terlihat bahwa mengenai keluarga miskin di Kelurahan Blambangan pada tahun 2016 yaitu 397 KK yang menerima Rastra, sebanyak 358 KK sedangkan yang tidak dapat rastra sebanyak 39 KK. pada tahun 2017 yaitu sebanyak 339 KK miskin sedangkan yang menerima Rastra 315 KK, dan pada tahun 2018 sebanyak 286 KK, sedangkan yang menerima rastra 278 KK, hal tersebut menunjukkan adanya adanya penurunan angka kemiskinan, data tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang timbul pada uraian sebelumnya dan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan, ternyata pelaksanaan kebijakan Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan, belum berjalan secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan walaupun terjadi penurunan angka yang memperoleh Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan. Dari hasil penelitian pendahuluan bahwa kepala keluarga yang tidak mendapat beras sejahtera (Rastra) bukan semata-mata kesalahan pendataan, namun karena masih ada keluarga yang belum mampu membeli Rastra tersebut sehingga menarik minat peneliti mengadakan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan, Kecamatan Blambangan Umpu.

Oleh sebab itu, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sesuai hasil penelitian pendahuluan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Smith (1973) dengan dimensi-dimensinya yaitu: *1. The idealized policy, 2. The target group, 3. The Implementing organization, 4. The environmental factors.* Sebagai acuan untuk penyelenggaraan kebijakan pemberian beras sejahtera adalah :

- 1) Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi kebijakan Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui apa saja kriteria yang mendapatkan kebijakan Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan, Kecamatan Blambangan Umpu.
- 2) Minimnya kemampuan sumber daya dalam implementasi kebijakan Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sehingga sasaran kebijakan atau kelompok sasaran Rastra kurang optimal, yang ditandai dengan pendataan masyarakat miskin yang kurang sesuai dengan harapan oleh masyarakat, kemudian pembagian Rastra mengalami berbagai kendala.
- 3), Organisasi pelaksana, yang dalam hal ini adalah sikap dan perilaku para pelaksana yang menunjukkan masih minimnya kesungguhan para pelaksana dalam mengimplementasikan Kebijakan, sehingga pembagian Beras sejahtera tidak terbagi sesuai ketentuan yang ada.
- 4) Dari Aspek faktor lingkungan, meliputi lingkungan organisasi pelaksana yang belum berjalan sebagaimana mestinya, hal terlihat bahwa pelaksana yang ditunjuk sesuai aturan tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, tetapi Lurah lebih mendominasi tentang pembagian Beras sejahtera, bahkan beras yang ada, di tampung dirumah Lurah, sehingga organisasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian bahwa aspek-aspek yang telah disebutkan diatas merupakan pertimbangan penulis untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul : Implementasi Kebijakan Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
2. Aspek-aspek apa yang menghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk beras sejahtera (Rastra) merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah, demikian pula aparat Desa/Kelurahan, Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Tokoh Masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Pusat yang diwakili Tim Koordinasi Beras sejahtera (Rastra) Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwakili Tim Koordinasi Rastra Daerah, Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, perlu bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan Program Rastra sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Program rastra melalau kebijakan Kepmensos No. 339 Tahun 2016, tentang Penetapan Penerima Rastra 2017. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Kebijakan program Rastra diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 tepat (6T) yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat waktu, (5) tepat kualitas, dan (6) tepat administrasi, (Pedoman Umum Rastra 2017). Upaya peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran, jumlah dan waktu distribusi pada tahun 2017 telah dikukan pilot proyek distribusi rastra melalui Warung Desa dan Pilot proyek distribusi rastra melalui pemberdayaan kelompok masyarakat (Pokmas), tahun 2018 pilot proyek dimaksud dilakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Hasil kajian menyebutkan bahwa distribusi rastra melalui Warung Desa dan Pokmas meningkat kinerja 6 Tepat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program rastra tahun 2018 Pemerintah Desa/Kelurahan dapat memilih salah satu dari tiga alternatif pelaksana distribusi berupa kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk pemerintah Desa/Kelurahan, Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) diwilayahnya. (Pedoman Rastra 2017:IIIi).

C. METODOLOGI

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian ini maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, (Creswell, 1994) mengemukakan bahwa *qualitative research is interpretative research. As such, the biases, values and judgement of the*

researches become stated explicitly in the research report. Such openness is considering to be useful and positive. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan Pemberian Beras Sejahtera (Rastra), di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, mengkaji secara kualitatif, bagaimana Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan obsevasi.

Penelitian kaulitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Kemudian menurut Moleong, (1995) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.

Melalui proses ini diharapkan muncul proposisi hipotetik baru melalui interpretasi interaksi antara atribut dan propretise yang selanjutnya digunakan untuk membangun kategori dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, aktivitas penelitian ini dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan. Melalui desain ini dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomenal tentang implementasi kebijakan Dalam Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk lebih jelasnya dalam implementasi kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (Rastra) sesuai yang dikemukakan oleh Smith (1973: 202-205) dengan dimensi-dimensinya yaitu: *1. The idealized policy, 2. The target group, 3. The Implementing organization, 4. The environmental factors*, diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Ideal

Pembuatan kebijakan publik adalah merupakan domain legislatif sedangkan implementasi kebijakan adalah merupakan wilayah eksekutif, yang secara faktual dapat

berupa ketetapan, keputusan dan semacamnya. Pandangan semacam ini mengesampingkan nilai politik yang dimiliki oleh birokrasi yang suatu ketika memiliki keputusan-keputusan politik sendiri di luar jalur yang ditetapkan ataupun memilih nilai-nilai diantara nilai-nilai yang ada.

Menurut Winarno (1989:45) mendefinisikan bahwa kebijakan ideal berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik, dimana analisisnya dapat mengenai pembentukan, substansi ataupun dampak kebijakan publik tanpa menyetujui atau menolak kebijakan tersebut. Implikasi dari kebijakan publik menjadi sesuatu kerangka yang bersifat kompleks dengan varian model kebijakan yang ditawarkan baik yang bersifat deskriptif maupun model yang bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebijakan ideal adalah, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan indikator-indikator tentang kebijakan ideal belum dilaksanakan dengan optimal. Perumusan dan penyusunan tentang operasionalisasi implementasi kebijakan yang harus ditempuh dan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan penyebar luasannya belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai hasil wawancara dengan Lurah Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu mengemukakan bahwa: Kebijakan pemerintah dalam pemberian beras sejahtera sangat membantu masyarakat miskin khususnya di Kelurahan Blambangan, Kecamatan Blambangan umpu, namun karena beras tersebut tidak sepenuhnya gratis untuk masyarakat miskin sehingga masih ada keluarga miskin yang mempertanyakan tentang kebijakan tersebut, karena tidak mampu untuk membeli, bahkan ada keluarga miskin yang mengatakan bahwa Lurah sengaja memungut biaya dari jatah beras untuk masyarakat miskin, hal ini karena ketidak tahuan masyarakat, dan kami telah menjelaskan hal tersebut. (Hasil wawancara Juni 2019).

Hal ini Sejalan yang dikemukakan oleh Nugroho (2003: 263) mengatakan bahwa kebijakan yang ideal adalah harus kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan dimasa depan. Agusti (2001: 50) menyebut model seperti ini sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, sebuah pola yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju dikawasan Asia. Dengan model ini dapat disertakan dengan model kebijakan yang menggunakan rasio “untung-rugi” dari sebuah kebijakan, seperti yang diperkenalkan dalam paradigma *cost benefit* analisis Boardman dkk, (1996:102), Pada prakteknya, ternyata memang demikian adanya. Setiap kebijakan harus mengandung unsur

progrmatisme dan untung rugi. Tentu saja, pemahamannya pertama kali diletakkan didalam konteks etika, yaitu tentang kebaikan dan keburukan.

Dengan demikian bahwa pada prinsipnya bahwa kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Sesuai hasil wawancara dengan masyarakat penerima rastra, di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu mengemukakan bahwa : dalam implementasi kebijakan beras sejahtera, sangat terbantu masyarakat miskin, namun karena masih ada kompensasi atau pembayaran harga beras, walaupun murah harganya tetapi tidak semua masyarakat mempunyai uang untuk menebus harga tersebut, sehingga pemerintah perlu memikirkan agar masyarakat diberikan beras secara gratis supaya masyarakat yang tidak mempunyai uang dapat memiliki beras subsidi tersebut. (Hasil Wawancara, Juni 2019).

Dari hasil wawancara tersebut didukung pendapat Dye, (1987: 68) memberikan batasan mengenai kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, menurut Dye bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektif) dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Sebab sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan yang ingin dicapai dari beberapa alternatif yang signifikan, mulai dari proses hingga implementasinya. Idealisasi perumusan kebijakan, tiada lain adalah merupakan langkah yang strategis dalam setiap roda organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta.

Dengan demikian bahwa, ada masyarakat miskin yang merasa kurang membutuhkan jatah beras dari pemerintah karena mereka baru selesai panen, namun ada juga masyarakat yang tidak mengambil jatahnya, kemungkinan dijual kepada orang lain yang sanggup mengambil jatah, bahkan ada keluarga yang tidak masuk dalam pendataan masyarakat miskin bersedia membeli beras jatah Rastra, sehingga pemberian jatah beras untuk keluarha miskin perlu juga pengawasannya agar tidak disalah gunakan oleh oknum masyarakat.

2. Sasaran Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan rastra, petugas yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan ialah menjabarkan dukungan secara luas tentang kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat sebagai sasaran kebijakan dapat mengetahui tentang implementasi kebijakan tersebut. Sesuai hasil wawancara dengan Camat Blambangan Umpu mengatakan bahwa: Dalam implementasi pemberian beras untuk keluarga miskin, ada yang kurang tepat sasaran, hal karena pemerintah memberikan beras untuk keluarga miskin pada daerah penghasil beras walaupun masih ada masyarakat yang tidak bercocok tanam dengan menanam padi, tapi masyarakat kurang mau membeli beras dengan harga murah karena ketidak tahuan masyarakat tentang program tersebut, selain hal tersebut ada juga masyarakat yang tidak mampu membeli beras karena tidak mempunyai uang untuk membeli beras, sehingga perlu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan Rastra agar dapat bermanfaat untuk masyarakat. (Hasil Wawancara, Juni 2019).

Hasil wawancara tersebut didukung pendapat Smith (1977: 202-205), mengemukakan bahwa, implementasi sebagai proses atau alur. Model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith ini terlihat bahwa proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Demikian halnya kalau dilihat dari jawaban informan menyangkut dimensi *The target group* nampaknya implementasi Kebijakan pemerintah tentang Rastra masih perlu disempurnakan oleh pelaksana kebijakan, karena masih berada pada level cukup, hal ini berarti pemahaman responden terhadap kelompok sasaran belum maksimal atau manfaat dari implementasi kebijakan pemerintah tentang Rastra belum banyak menunjang kebutuhan hidup masyarakat miskin, karena terkadang kebijakan tersebut kurang mengenai sasaran.

3. Organisasi Pelaksana

Tujuan implementasi kebijakan, maka pelaksana kebijakan harus benar-benar mengetahui tentang pesan kebijakan tersebut. Wawancara antara pembuat kebijakan kadang-kadang menghasilkan informasi yang berharga tentang apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Sesuai hasil wawancara dengan Lurah Blambangan, mengemukakan bahwa: Kebijakan pemerintah tentang pemberian Rastra yang diberikan oleh pemerintah, perlu didukung, sehingga dalam penyalurannya perlu melihat kemampuan masyarakat yang ada di Kelurahan Blambangan yang relatif rendah tingkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, di satu sisi di Kelurahan Blambangan juga merupakan salah satu

menghasil beras di Kabupaten Way Kanan sehingga yang banyak membutuhkan Rastra pada umumnya hanya petani yang tidak menggarap sawah, atau masyarakat yang mempunyai mata pencaharian selain bersawah, atau mereka bergerak pada tanaman perkebunan dan palawija, dan perdagangan.(Wawancara Juni 2019).

Agar implementasi dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggungjawab terhadap sebuah kebijakan, harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Sehingga akan terjadi kebingungan para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dan memberi peluang untuk tidak diimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa organisasi pelaksana belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden relatif masih berada pada level cukup, dengan demikian masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan kebijakan beras sejahtera (Rastra). Utamanya penambahan pelaksana sehingga tidak terjadi penumpukan masyarakat miskin dalam menerima beras sejahtera (Rastra).

4. Faktor Lingkungan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan. Hal ini menuntut kepekaan dan daya tanggap pejabat publik untuk menangkap dan memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga dituntut untuk melakukan tindakan dalam bentuk suatu kebijakan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka faktor lingkungan dalam pembuatan Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan yang ingin dicapai dari beberapa alternatif yang signifikan, mulai dari proses hingga implementasinya. Idealisasi perumusan kebijakan, tiada lain adalah merupakan langkah yang strategis dalam setiap roda organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, sehingga faktor lingkungan juga perlu diperhatikan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan penerapannya. Sesuai hasil wawancara dengan Petugas Pembagi Rastra, mengatakan bahwa : Dalam memberikan Rastra kepada masyarakat, sering ada yang menanyakan bahwa kebijakan pemberian Rastra seharusnya gratis, namun kami selalu memberikan pengertian bahwa pemberian pemerintah secara gratis, namun harus diambil pada Kantor Cabang Bulog Way Kanan, sehingga

memerlukan jasa pengangkutan untuk sampai pada Kelurahan Blambangan, Kecamatan Blambangan Umpu, dengan pengeluaran dana tersebut maka masyarakat dikenakan biaya operasional yang digantikan melalui kompensasi atas beras tersebut sebesar 1000 rupiah perkilogramnya. (Wawancara Juni 2019).

Dalam lingkungan pembuatan kebijakan melibatkan para pembuat kebijakan seperti Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati dan individu lain yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dalam lingkungan implementasi pihak yang terlibat juga jauh lebih bervariasi, tergantung dari jenis kebijakan yang ditetapkannya. Mereka adalah terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kelompok masyarakat yang terkait dengan kebijakan, media massa, penilai dan lain-lain. Sedangkan yang terkait dalam lingkungan evaluasi adalah para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan.

Dengan demikian faktor lingkungan akan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, menurut Smith bahwa faktor lingkungan dapat menjadi penghambat yang harus diatasi melalui suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Untuk kebijakan yang berbeda, akan meliputi faktor sosial budaya, kondisi politik, dan kondisi ekonomi yang berbeda pula. Sebagai contoh tentang kebijakan yang berkaitan dengan kemandirian pemerintahan di dunia ketiga, budaya dasar dan model kehidupan sosial atau gaya hidup sosial pada tingkat desa akan menjadi lingkungan penghambat yang sangat besar.

5. Aspek-aspek yang menghambat Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Rastha, di Kelurahan Blambangan.

Dari penjelasan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Implementasi Kebijakan Dalam Pemberian Rastha, di Kelurahan Blambangan, pada prinsipnya masih perlu mendapatkan pendampingan secara berkesinambungan karena masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Pembagian beras untuk rumah tangga miskin di Kelurahan Blambangan masih menemui kendala yaitu belum efektifnya pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi kebijakan Rastha di Kelurahan Blambangan, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui apa saja kriteria yang mendapatkan kebijakan Rastha di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu, dengan demikian masih ada masyarakat, yang kurang mendukung program tersebut, utamanya menyangkut pemberian kontribusi jasa angkutan dan buruh terhadap penerimaan Rastha.
- b. Relatif minimnya kemampuan sumber daya dalam implementasi kebijakan Rastha di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu, sehingga sasaran kebijakan atau

kelompok sasaran Rastra kurang optimal, yang ditandai dengan pendataan masyarakat miskin yang kurang sesuai dengan harapan oleh masyarakat, kemudian pembagian Rastra kurang sesuai dengan harapan masyarakat.

- c. Fasilitas kerja yang kurang memadai, berupa gudang penampungan beras untuk dibagikan kepada rumah tangga miskin, sehingga penampungan beras di tempat pada aula Kelurahan, dan bahkan sebagian ditempatkan di rumah Lurah. Dengan demikian dapat mengganggu pegawai dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Menurut penulis bahwa dukungan fasilitas kerja dalam menjalankan tugasnya sangat mempengaruhi terhadap efektivitas pelaksanaan Rastra. Sesuai hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Smith (1973: 202-205) dengan dimensi-dimensinya yaitu: *1. The idealized policy, 2. The target group, 3. The Implementing organization, 4. The environmental factors*. Sangat sesuai dengan penelitian ini.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disusun kesimpulana sebagai berikut :

1. Sesuai hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Blambangan Kecamatan Blambangan Umpu melalui dimensi (1) Kebijakan ideal, bahwa kebijakan pemerintah untuk memberikan rastra sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, dari 278 masyarakat miskin tahun 2018, namun belum dapat menurunkan angka kemiskinan, (2) Sasaran Kebijakan, telah sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk membantu keluarga miskin, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih ada keluarga miskin yang belum bisa membayar beras untuk jatahnya, (3). Organisasi pelaksana telah dibuat sesuai dengan kebutuhan, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan fungsi dan wewenang dari masing-masing bidang, bahkan terkesan organisasi kurang berjalan, pelaksanaannya karena pegawai yang ditunjuk relatif sedikit, sehingga Lurah masih mendominasi sistem pembagian beras, (4) Faktor lingkungan, telah sesuai dengan adanya rastra, namun masih ada masyarakat yang tidak terdata masyarakat miskin.
2. Aspek-Aspek yang menghambat yaitu: (1) Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi kebijakan Rastra di Kelurahan Blambangan, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui apa saja kriteria yang mendapatkan

kebijakan Rastra. (2) Relatif minimnya kemampuan sumber daya dalam implementasi kebijakan Rastra, sehingga sasaran kebijakan atau kelompok sasaran rastra kurang optimal, yang ditandai dengan pendataan masyarakat miskin yang kurang sesuai dengan harapan oleh masyarakat, kemudian pembagian Rastra kurang sesuai dengan harapan masyarakat. (3) Fasilitas kerja yang kurang memadai, berupa gudang penampungan beras, dan bahkan sebagian ditempatkan dirumah Lurah. Dengan demikian dapat mengganggu pegawai dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George, C., 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Goggin, Malcolm L. and O.M. Bowman, James P. Lester and Lawrence J.O. Toole, 1990, *Implementation Theory and Practice: Toward and Third Generation*, Scoot, Foresman and Company, Illinois.
- Irawan, Handi D., 2002. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*, Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo.
- Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1995. *Kebijakan Publik (Public Policy)* Editor Natsir Budiman, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kasali, Rhenald, 1994. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997., *Membangun Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Cides.
- Mustopadidjaja, A.R., 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, R., 2003 *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Siagian, Sondang P., 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Smith, B.C., 1977. *Policy Making in British Government*, London : Martin Robertson.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung, Humaniora Utama Press.
- Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 70 tahun 2009 tentang Penetapan Pagu Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Metro tahun 2015.